

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, HUBUNGAN POLITIK, DAN
FAMILY-ALIGNED BOARD TERHADAP IMPLEMENTASI TATA
KELOLA PERUSAHAAN**

(Tesis)

Oleh

**AGUSTINA WAHYU WIDYANINGRUM
NPM 2221031004**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, HUBUNGAN POLITIK, DAN
FAMILY-ALIGNED BOARD TERHADAP IMPLEMENTASI TATA
KELOLA PERUSAHAAN**

Oleh

AGUSTINA WAHYU WIDYANINGRUM

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, HUBUNGAN POLITIK, DAN
FAMILY-ALIGNED BOARD TERHADAP IMPLEMENTASI TATA
KELOLA PERUSAHAAN****Oleh****Agustina Wahyu Widyaningrum**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kepemilikan keluarga, hubungan politik dan *family-aligned board* berpengaruh terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Indonesia yang masuk dalam top 50 Emiten Mid Cap Indonesian Award selama periode 2017-2019, yang diselenggarakan oleh pihak *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD). Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang terdiri dari 57 perusahaan yang masuk dalam *Top 50 Emiten Mid Cap Indonesian* dari IICD selama periode 2017-2019. Metode analisis penelitian ini adalah regresi linier berganda dan menggunakan *software IBM SPSS 23*. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap implementasi tata kelola perusahaan, selanjutnya untuk hubungan politik berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Terakhir *family-aligned board* berpengaruh negatif signifikan terhadap implementasi tata kelola perusahaan.

Kata Kunci: Tata kelola perusahaan, Kepemilikan keluarga, hubungan politik, *family-aligned board*

ABSTRACT**THE IMPACT OF FAMILY OWNERSHIP, POLITICAL TIES, AND
FAMILY-ALIGNED BOARD ON THE IMPLEMENTATION OF
CORPORATE GOVERNANCE****By****Agustina Wahyu Widyaningrum**

This study aims to analyze whether family ownership, political relations, and family-aligned boards affect the implementation of corporate governance. The population in this study are Indonesian companies included in the Top 50 Mid Cap Indonesian Award Issuers during the 2017-2019 period, organized by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). The sample in this study used the purposive sampling method, which consisted of 57 companies included in the Top 50 Mid Cap Indonesian Issuers from IICD during the 2017-2019 period. The method of analysis of this research is multiple linear regression and uses IBM SPSS 23 software. The findings in this study indicate that family ownership has a significant negative effect on the implementation of corporate governance, while political relations has a significant positive effect on the implementation of corporate governance. Finally, the family-aligned board has a significant negative effect on the implementation of corporate governance.

Keywords: corporate governance, family ownership, political connections, family-aligned board

Judul Tesis : **PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, HUBUNGAN POLITIK, DAN FAMILY ALIGNED BOARD TERHADAP IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN**

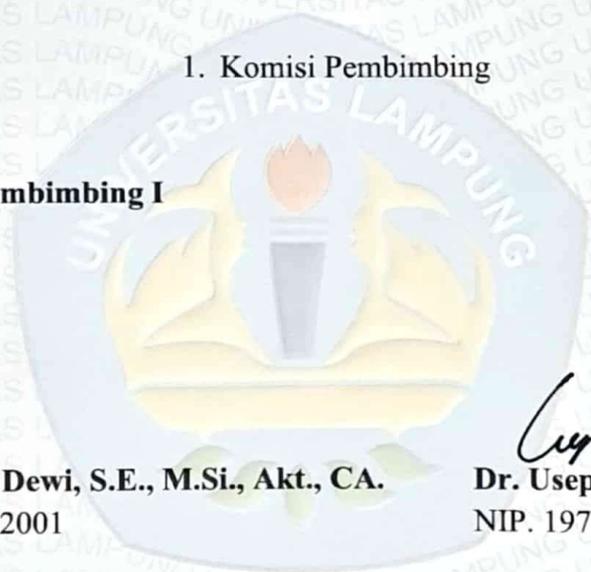
Nama Mahasiswa : Agustina Wahyu Widyaningrum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2221031004
Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP 19710802 199512 2001

Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S. Ak.
NIP. 19760830 200501 1003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19750620 200012 2001

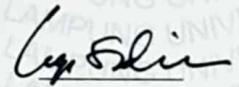
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., CA.**



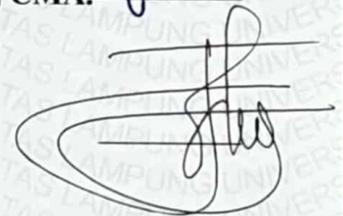
Sekretaris : **Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.**



Penguji Utama : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**



Anggota Penguji : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003



3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1001



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 11 Oktober 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina Wahyu Widyaningrum

NPM : 2221031004

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan *Family-aligned Board* terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar lampung, 16 Oktober 2024



Agustina Wahyu Widyaningrum

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Agustina Wahyu Widyaningrum dan biasa disapa dengan Arum. Penulis lahir di Kotabumi tanggal 31 Mei 1999, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Agus Hermawan dan Ibu Widyastuti. Penulis berasal dari Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

Berikut pendidikan formal yang pernah ditempuh.

1. Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 06 Kelapa Tujuh lulus pada tahun 2011.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 07 Kotabumi lulus pada tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA N 3 Kotabumi lulus pada tahun 2017.
4. Pendidikan Strata 1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus pada tahun 2022.

Penulis pada tahun 2022 melanjutkan pendidikan pasca sarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2024.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis sampai pada tahap ini.

Karya kecil ini ku persembahkan untuk

Diriku Sendiri

Aku yang sudah berjuang dengan doa dan usaha untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih untuk selalu kuat dan semangat dalam menghadapi segala kondisi dan situasi.

Kedua orang tuaku

Yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar telah membesarkan dan mendidikku dengan kasih sayang yang berlimpah. Tak pernah berhenti menasehati, mendukung, mendoakanku selalu. Terima kasih sudah menjadi sandaran pertama dan tempat terbaik dikala aku tak mampu memikul beban sendirian.

Calon Suamiku

Terimakasih Satria Darmawan yang selalu mendukung semua keputusanku, membersamai, menyemangati dan memotivasiku disaat lelah, untuk terus belajar dan tidak menyerah dalam meraih apa yang dicita-citakan.

Sahabat-sahabatku

Terima kasih untuk semua canda tawa dan tangisan yang kalian bagi padaku, terima kasih untuk nasihat dan motivasi agar aku menjadi pribadi yang lebih baik, terima kasih untuk semua dukungan dan bantuan kalian selama ini.

Semua dosen, staff dan almamater tercinta

Terimakasih Pak, Buk atas semua jasa kalian, terima kasih atas semua ilmu yang kalian ajarkan dan semua motivasi hidup yang kalian tanamkan kepadaku, semoga Allah SWT selalu memberkahi setiap perjalanan dan memudahkan segala urusan bapak dan ibu semua.

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.
(Q.S Al Baqarah : 286)

Untukmu yang sedang berusaha, libatkan Allah dalam setiap usahamu, taruhlah doa sebagai pembuka, penengah, dan penutup usahamu. Dan biarkan hatimu tenang dengan semua ketetapan dan pemberiannya, karena hatimu pantas untuk bahagia, bukan terkurung dalam ambisi dan kesedihan yang panjang

Orang yang paling bijaksana adalah orang yang sadar akan kesalahan dirinya sendiri dan buta terhadap kesalahan orang lain.
(Imam Ali bin Abi Thalib)

Jangan pernah menyesal menjadi terlalu baik karena hadiahmu ada pada Allah, bukan manusia.
(Agustina Wahyu Widyaningrum)

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisa Metode *Beneish M-Score* dan *Dechow F-Score* dalam Mendeteksi Indikasi *Fraudulent Financial Reporting*”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA. IPM, ASEAN Eng. sebagai Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku pembimbing utama yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.
6. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku penguji utama yang telah memberikan arahan, saran dan kritik selama penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. selaku anggota penguji yang telah memberikan arahan, saran dan kritik selama penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Agus Hermawan dan Ibu Widyastuti, yang selalu memberikan kasih sayang tak terhingga, yang selalu mendoakanku dan memberikan perhatian yang amat luar biasa, kesabaran dalam membesarkan dan mendidikku sampai kini, serta perjuangan yang telah diberikan kepadaku.

12. Untuk Calon Suamiku Satria Darmawan yang selalu mendukung setiap keputusanku, menemani disaat senang dan sedih, memotivasi agar selalu semangat, dan membantuku dalam segala hal.
13. Seluruh keluarga besarku Alm.Kakung Tukiman, Uti Sukasmi, Pakde, Bude, Om, Bulek, serta sepupu-sepupuku yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta do'a.
14. Sahabat seperjuangan MIA: Bellay Noviani, Valentina Rani, Mba Diah Miharsi, Mba Yuliani, Rifki Safutra, Diah Kurnia, Chika, Rizka, Laras, dan Mba Ines. Terima kasih untuk semua dukungan, motivasi serta kebaikan kalian selama ini.
15. Sahabat-sahabatku, yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, dan yang telah kebersamai selama masa perkuliahanku, selalu ada dalam suka dukaku, selalu memberi semangat, serta do'a.
16. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Akuntansi 2022 yang telah membantu belajar, berbagi canda tawa, dan kebahagiaan selama proses penyelesaian tesis ini.
17. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini baik langsung atau tidak langsung semoga bernilai ibadah dan Allah lipat gandakan kebaikan kalian.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bandar lampung, 16 Oktober 2024

Agustina Wahyu Widyaningrum

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.1.2 Tata Kelola Perusahaan	11
2.1.3 Kepemilikan Keluarga	13
2.1.4 Hubungan Politik Perusahaan.....	14
2.1.5 <i>Family-aligned Board</i>	15
2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	17
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	21
2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan	21
2.3.2 Pengaruh Hubungan Politik Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan	22

2.3.3 Pengaruh <i>Family-aligned Board</i> Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan	23
2.4 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN	25
3.1 Populasi Dan Sampel.....	25
3.1.1 Populasi Penelitian.....	25
3.1.2 Sampel Penelitian.....	25
3.2 Definisi Operasional	26
3.2.1 Implementasi Tata Kelola Perusahaan.....	26
3.2.2 Kepemilikan Keluarga	28
3.2.3 Hubungan Politik	29
3.2.4 <i>Family-aligned Board</i>	30
3.2.5 Variabel Kontrol	32
3.2.5.1 Usia Perusahaan.....	32
3.3 Teknik Analisis Data	32
3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	33
3.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.3.2.1 Uji Normalitas.....	33
3.3.2.2 Uji Multikolinearitas	33
3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	34
3.3.3 Transformasi Data.....	34
3.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	34
3.3.5 Uji F (Uji Simultan)	35
3.3.6 Uji Hipotesis (Uji t).....	35
3.3.7 Koefisien Determinan (R^2).....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	43
4.2.1 Uji Normalitas (<i>Kolmogorov Smirnov</i>)	44
4.2.2 Uji Multikolinearitas.....	44

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	45
4.3 Uji F (SIMULTAN).....	45
4.4 Uji t.....	46
4.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	48
4.6 Pembahasan	48
4.6.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan	48
4.6.2 Pengaruh Hubungan Politik Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan.....	51
4.6.3 Pengaruh <i>Family-aligned Board</i> Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan	54
BAB V KESIMPULAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Keterbatasan	59
5.3 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1. Penelitian Terdahulu	17
3. 1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian	25
3. 2. Komposisi dan Struktur Level 1	27
3. 3. Komposisi dan Struktur Level 2	28
3. 4. Indikator Informasi Perusahaan yang Memiliki Hubungan Politik	30
3. 5. Indikator Informasi dewan direksi dan/atau dewan komisaris yang memiliki hubungan keluarga pemegang saham	32
4. 1. Statistik Deskriptif.....	37
4. 2. Frekuensi Tabel Hubungan Politik.....	41
4. 3. Frekuensi Tabel <i>Family-aligned Board</i>	42
4. 4. Hasil Uji Normalitas	44
4. 5. Hasil Uji Multikolinearitas.....	44
4. 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
4. 7. Hasil Uji F	45
4. 8. Hasil Uji t	46
4. 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. 1 Skor Rata-rata Negara Hasil dari Penilaian <i>ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD COUNTRY REPORTS AND ASSESSMENTS 2019</i>	3
1. 2 Kerangka Pemikiran	5
1.3 Histogram Dependent Variabel	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Asia termasuk Indonesia, *corporate governance* mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut. Indonesia mulai menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKKG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional.

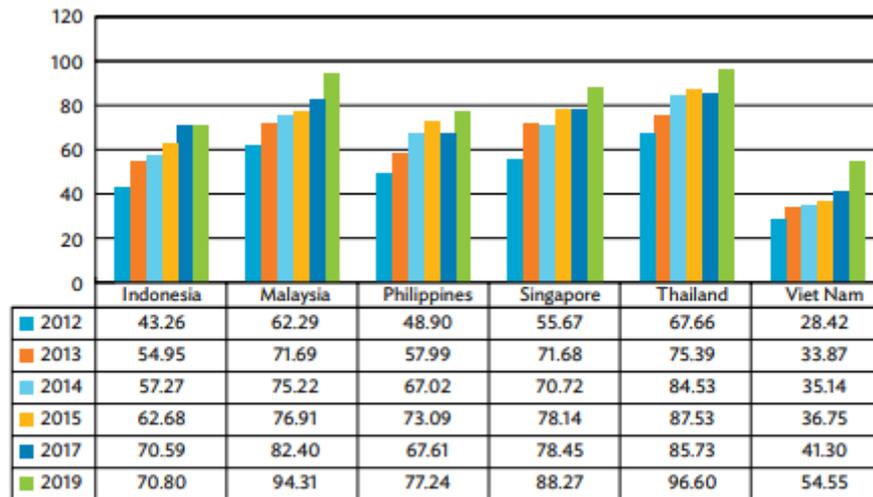
Menurut menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto, dalam *Indonesian Institute for Corporate Directorship Corporate Governance* (IICD CG) *Conference* bertema *The 10th ACGS Implementation: Road to ESG in Indonesia*, secara virtual di Jakarta, *Good Corporate Governance* masih menjadi salah satu kelemahan yang dipunyai sebagian besar perusahaan di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di akhir tahun 90-an adalah tata kelola perusahaan yang kurang baik, antara lain berupa kualitas investasi yang buruk, diversifikasi usaha yang sangat luas, jumlah pinjaman jangka pendek tak lindung nilai yang sangat banyak, lemahnya peran direksi dan komisaris, sistem audit yang buruk, kurangnya transparansi, serta penegakan hukum yang lemah. Pada dasarnya praktik tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor yang berdampak pada kenaikan harga saham perusahaan (Nizami & Sakir, 2019).

Perkembangan terkini seputar pandemi global semakin memperjelas bahwa tata kelola perusahaan yang baik memainkan peran yang sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan ekonomi global. Situasi saat ini memaksa semua negara untuk menerapkan langkah-langkah luar biasa, yang menempatkan manajemen risiko dan respons krisis yang efektif digaris depan, yang membedakan antara kelangsungan hidup dan penutupan di antara perusahaan. Di masa-masa sulit ini, panggilan untuk tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi hal mendesak yang melampaui batas prestise, sosial, dan politik, dan ASEAN CG Scorecard itu sendiri (*ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments*, 2019).

Penilaian atas implementasi *Good Corporate Governance* oleh ASEAN CG Scorecard berperan penting untuk kemajuan tata kelola yang diterapkan di Indonesia. Tujuan publikasi ASEAN CG Scorecard sendiri adalah mengatasi perbedaan politik, ekonomi, budaya, membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dan mendorong kerja sama antar negara. Penilaian ASEAN CG Scorecard terus dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan tolak ukur internasional seperti *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Principles of Corporate Governance (2004)*, *G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015)*, *International Corporate Governance Network (ICGN)* serta praktik industri terkemuka dari ASEAN dan dunia.

Hasil penilaian atas implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia secara keseluruhan dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments* tahun 2019 memperoleh nilai indeks 70,59 pada tahun 2017 dan 70,8 pada 2019. Berdasarkan survei mengenai penerapan tata kelola perusahaan menurut ASEAN CG Scorecard Indonesia menempati urutan kedua terbawah hanya di atas Vietnam. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sudah mengalami peningkatan tetapi masih memiliki kekurangan (Ningrum, 2022). Seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini skor rata-rata menurut negara berdasarkan hasil penilaian oleh ASEAN CG Scorecard:

1.1 Skor Rata-Rata Negara Hasil Dari Penilaian *ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD COUNTRY REPORTS AND ASSESSMENTS* 2019



Sumber: *ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments, 2019.*

Faktor yang dapat mempengaruhi implementasi tata kelola perusahaan salah satunya adalah kepemilikan keluarga di dalam suatu perusahaan. Menurut penelitian Lukviarman (2004) menemukan bahwa kepemilikan mayoritas perusahaan terbuka di Indonesia terkonsentrasi pada sekelompok individual, keluarga, atau kepemilikan melalui perusahaan lainnya. Kondisi ini terutama ditemukan pada perusahaan nasional di mana kepemilikan keluarga yang mengendalikan perusahaan terbuka, pada hakikatnya menguasai hampir keseluruhan pengendalian atas perusahaan oleh sekelompok bisnis yang dimiliki oleh keluarga mereka.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *PricewaterhouseCooper* (2014) di Asia Tenggara, 60% perusahaan terbuka (tbk) adalah merupakan perusahaan keluarga dan lebih dari 95% kepemilikan bisnis di Indonesia adalah dimiliki keluarga. Menurut PWC (*PricewaterhouseCoopers, 2021*) kesenjangan tata kelola Indonesia salah satunya ialah lebih dari 80% bisnis keluarga di Indonesia mengakui konflik keluarga terjadi di dalam bisnis. Keluarga dalam perusahaan keluarga cenderung akan mendominasi sebagian besar saham di perusahaan sehingga mereka bisa menjadi pemegang saham mayoritas. Kemudian mayoritas suara akan menjadi yang

paling berpengaruh dalam pembuatan keputusan yang dapat memicu konflik kepentingan antar minoritas dan mayoritas pemegang saham dalam menentukan arah perusahaan (Syarifah, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan Lukviarman (2004) menemukan bahwa tidak terdapat manfaat dan dampak positif kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan terbuka di Indonesia. Dalam kasus perusahaan terbuka di Indonesia, tidak terdapat keunggulan atau manfaat perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja sebagaimana diprediksi oleh *agency theory*.

Menurut Lukviarman (2004) dalam kasus perusahaan di Indonesia, dominasi pola struktur ditentukan oleh karakteristik perusahaan dengan mempertimbangkan manfaat privat (*privat benefit*) bagi pemilik perusahaan dalam jumlah besar. Hal demikian merupakan bagian dari upaya pemilik yang memiliki hak pengendalian terbesar untuk tetap menikmati manfaat privat dari kepemilikan mereka terhadap perusahaan, dengan cara hanya menjual sebagian kecil kepemilikan kepada publik. Dalam hubungannya dengan pola kepemilikan keluarga dapat disimpulkan bahwa perusahaan terbuka yang tetap dikendalikan oleh keluarga melalui kepemilikan dalam jumlah besar, merupakan upaya untuk tetap menguasai perusahaan dan sebagian proteksi terhadap kekayaan keluarga mereka (*family wealth*).

Keluarga pemilik perusahaan menghargai kepemilikannya sebagai aset untuk diwariskan kepada generasi berikutnya (Cheng, 2014). Agar bisnis keluarga dapat terus berkembang dan diwariskan kepada generasi mendatang, perusahaan perlu mengatasi segala kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal muncul dalam suatu perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kendala eksternal berasal dari luar perusahaan dan berada di luar kendali perusahaan, seperti kebijakan pemerintah yaitu regulasi, subsidi, dan pajak (Watts & Zimmerman, 1990).

Cara untuk meminimalisir kendala eksternal tersebut adalah dengan membuat hubungan politik. Secara sederhana hubungan politik merupakan hubungan antara politisi atau pejabat pemerintah dengan bisnis (perusahaan) untuk mencapai tujuan tertentu (Utamaningsi, 2020). Hubungan politik dapat menguntungkan perusahaan dalam beberapa sisi seperti: memperoleh kontrak dan subsidi dari Pemerintah

(Abelson, 1984), perlakuan pajak yang lebih baik (Faccio, 2006), akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendanaan (Khwaja & Mian, 2005), pengawasan yang kurang ketat (Stigler, 1971) dan bahkan harga IPO yang lebih tinggi (Francis *et al*, 2009). Berlakunya UU No. 2 tahun 2011 Pasal 34 dan 35 yang mengatur sumber keuangan dan batas maksimum sumbangan untuk partai politik memberikan gambaran bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha. Etika balas budi yang masih kental di Indonesia memberikan pandangan bahwa sumbangan yang diberikan perusahaan pada partai politik tidak secara gratis. Perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan mengharapkan adanya timbal balik atau manfaat yang diperoleh dari sumbangan tersebut.

Pengaruh dari hubungan politik perusahaan tidak hanya pada performa finansialnya saja melainkan juga berpengaruh pada praktek penerapan tata kelola perusahaan. Menurut Micco, *et al.*, (2007) ada kemungkinan pelaporan keuangan perusahaan yang memiliki hubungan politik menyesuaikan laporan keuangannya dengan kepentingan pemegang saham pengendali sehingga mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Dunia politik pada dasarnya memiliki tujuan untuk mampu merumuskan kebijakan publik dimana didalamnya termasuk kepentingan dunia bisnis (Ningrum, 2022). Hubungan politik di perusahaan dapat diartikan sebagai suatu jajaran direksi atau komisaris serta para pemegang saham beserta kepemilikan keluarganya memiliki hubungan atau pemegang jabatan politik (Putri, 2022).

Mekanisme pengawasan dan pengendalian korporasi melalui keterlibatan anggota keluarga pemilik pengendali dalam kepengurusan perseroan, diharapkan dapat meminimalisir biaya keagenan. Tujuan beroperasi melalui keterlibatan pemilik dalam kepengurusan korporasi yang seharusnya direfleksikan melalui pengurangan informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*). Dengan demikian, pemilik pengendali dapat mengimplementasikan pengendalian yang semakin efektif karena bagian anggota keluarga mereka terlibat langsung sebagai anggota dewan komisaris dan/atau direksi perusahaan. Jika keterlibatan pemilik dapat berjalan efektif sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal perusahaan, maka hal tersebut

dipercaya dapat meminimalisir biaya pengawasan (*monitoring costs*) (Lukviarman, 2004).

Anggota keluarga konsentrasi kepemilikan keluarga dalam memilih dan mengontrol proses pemilihan dewan direksi dan dewan komisaris dikaitkan untuk melindungi kepentingan pengendalian keluarga pemegang saham (Syarifah, 2019). Keberadaan anggota dewan komisaris terafiliasi dengan pemegang saham merupakan bagian dari upaya pemilik perusahaan untuk melindungi investasi mereka dalam kondisi yang berisiko. Konsekuensinya pemegang saham pengendali dengan kepentingan investasi paling besar dalam perusahaan akan melakukan pengendalian dan monitoring secara ketat, dan jika memungkinkan akan mempengaruhi keputusan perusahaan demi kepentingan mereka, sehingga dipertanyakan bagaimana kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan dapat mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik.

Secara empiris, penelitian mengenai implementasi tata kelola perusahaan telah banyak dilakukan di berbagai negara baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya adalah Haque, *et al.*, (2011) di Bangladesh dan Wirawan (2014) di Indonesia. Pertama penelitian dari Haque, *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari kepemilikan yang terkonsentrasi, susunan direksi yang terkoneksi dengan keluarga, serta hubungan politik dari perusahaan terhadap kualitas dari tata kelola perusahaannya. Menurut penelitian dari Wirawan (2014), menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap *family-aligned board* dan memiliki hubungan negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan serta hubungan politik tidak memiliki pengaruh negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguji kepemilikan keluarga, hubungan politik, dan *family-aligned board* terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Kebanyakan penelitian sebelumnya menguji hubungan politik dan *family-aligned board* menggunakan dummy bernilai 1 dan 0 sedangkan pada penelitian ini dikembangkan menjadi pengukuran yang lebih detail. Lebih lanjut pada penelitian ini mengenai tata kelola perusahaan dengan pengukuran ASEAN CG Scorecard sangat penting dan menarik untuk diteliti karena penelitian

sebelumnya masih jarang dalam menggunakan pengukuran tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini. Dengan mengacu pada penelitian (Haque *et al.*, 2011), penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dominasi dari kepemilikan keluarga, dan hubungan politik berpengaruh pada penerapan dan praktik tata kelola perusahaan serta pemilihan anggota direksi dan komisaris di Indonesia.

Selanjutnya peneliti akan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam 50 perusahaan terbaik menurut *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dikarenakan IICD merupakan sebuah organisasi terkemuka yang memiliki visi untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. IICD juga menggunakan metodologi penilaian yang terstandar dan kredibel berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) ICMF yang dikeluarkan oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Dikarenakan penilaian dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard yang telah selesai diluncurkan sampai tahun 2019, maka peneliti akan menggunakan rentang waktu penelitian yang dimulai dari tahun 2017-2019.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan memberikan judul pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan *Family Aligned Board* Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap implementasi tata kelola perusahaan?
2. Apakah hubungan politik perusahaan berpengaruh terhadap implementasi tata kelola perusahaan?
3. Apakah *Family-aligned Board* berpengaruh terhadap implementasi tata kelola perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap implementasi tata kelola perusahaan.
2. Untuk menganalisis apakah pengaruh hubungan politik terhadap implementasi tata kelola perusahaan.
3. Untuk menganalisis apakah pengaruh *family-aligned board* terhadap implementasi tata kelola perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis berikan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan yang terdaftar pada sampel penelitian ini dalam meningkatkan kinerjanya yang dikaitkan dengan tata kelola perusahaan. Karena dengan penerapan tata kelola perusahaan maka menciptakan transparansi dalam pengelolaan perusahaan yang berjalan secara efektif maka dapat mengidentifikasi resiko sedini mungkin sehingga tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap resiko tersebut dapat cepat dan tepat yang berujung pada keberlangsungan (*going concern*) organisasi dan kualitas/mutu, aset organisasi dapat dijaga.

b. Manfaat Teoritis

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan terlebih lagi pembahasan mengenai kinerja perusahaan yang telah mengimplementasi tata kelola perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan implementasi tata kelola perusahaan dengan menggunakan pengukuran baru untuk variabel:

1. Variabel hubungan politik menggunakan pengukuran dengan kategorikal 0-3. Pada penelitian sebelumnya variabel hubungan politik diukur menggunakan dummy 0-1 yang menjelaskan jika 0 bila direktur utama perusahaan tidak memiliki hubungan atau bagian dari keluarga pemegang saham dan 1 bila direktur utama perusahaan memiliki hubungan atau bagian dari keluarga pemegang saham. Dalam penelitian ini pengukuran dijelaskan secara lebih rinci

dengan indikator informasi yang telah diungkapkan oleh penelitian Faccio (2006) yang dikembangkan oleh penelitian Puspitasari (2016).

2. Variabel *family-aligned board* menggunakan pengukuran dengan kategorikal 0-2. Penelitian ini mengacu pada Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan agensi didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Menurut Arifin (2005) *principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama *principal*, sedangkan *agent* merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan.

Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*). Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara *principal* dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *Agency Theory* dikenal sebagai *Asymmetric Information (AI)*. *Asymmetric Information* yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan *agent*. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer (Arifin, 2005).

Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (*asymmetric*) ini, dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

a) *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

b) *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. (Arifin, 2005).

Akibat hubungan agensi ini, maka munculnya *agency problem* yang dalam hal ini pihak agen akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan prinsipal padahal tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk pengendalian untuk mengendalikan tindakan pihak agen (Triyuwono, 2018).

2.1.2. Tata Kelola Perusahaan

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Nilai tambah yang dimaksud adalah *Corporate Governance* memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Pengertian lain *Corporate Governance* menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/MPM/PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan (Arifin, 2005).

Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG) pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan. Penjelasan ke empat prinsip dasar di atas adalah sebagai berikut:

1. Kewajaran (*fairness*). Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik insider trading yang dilakukan oleh *agent*/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena di antara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).
2. Akuntabilitas (*accountability*). Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.
3. Transparansi (*transparency*). Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin

adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2003:51). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.

4. **Responsibilitas (*responsibility*).** Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

2.1.3. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga (*family ownership*) adalah perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh keluarga. Kepemilikan keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggotanya berasal dari sebuah keluarga pemilik perusahaan yang kemudian menjabat dengan posisi sebagai dewan direksi atau sebagai pemegang saham yang dominan (Ningrum, 2022).

Tata kelola perusahaan mengacu pada struktur dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan bisnis serta hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham pengendali, pemegang saham minoritas, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan kinerja perusahaan, sangat penting bagi perusahaan untuk mengadopsi struktur tata kelola perusahaan yang baik untuk memungkinkan perusahaan berkembang (Sarbah dan Xiao, 2015).

Menurut survey bisnis keluarga 2014 oleh *PricewaterhouseCoopers* (PWC) ada tiga ciri sebuah perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan keluarga pertama, jika mayoritas 'suara' berada di tangan pendiri atau orang yang mengakuisisi perusahaan (atau pasangan, orang tua, anak atau ahli waris), kedua setidaknya ada satu perwakilan keluarga yang terlibat di dalam manajemen atau administrasi perusahaan, ketiga untuk perusahaan publik (tbk.), pendiri atau orang yang mengakuisisi perusahaan (atau keluarganya) ada setidaknya satu orang anggota keluarga dalam manajemen (*board*).

Implementasi *good corporate governance* sangat penting bagi perusahaan kepemilikan keluarga karena dapat membantu dalam menyeimbangkan kepentingan pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, serta membantu dalam mengatasi konflik peran di antara anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis. Selain itu, *good corporate governance* juga dapat membantu dalam menciptakan hubungan yang produktif dan berkelanjutan antara pemegang saham keluarga dan eksekutif yang mengelola bisnis, yang mungkin bukan anggota keluarga (Sarbah dan Xiao, 2015)

2.1.4. Hubungan Politik Perusahaan

Perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan, pemegang saham mayoritas atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai yang berkuasa (Faccio, 2006).

Menurut Chaney *et al.*, (2010) terdapat beberapa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan yang memiliki hubungan politik, yang pertama perusahaan mendapatkan manfaat dari relasi hubungan politik yang ada di perusahaan. Kedua, para politisi memberikan perlindungan kepada perusahaan sebagai tempat mereka dalam menanamkan investasi. Dengan adanya hal tersebut maka manajer juga tidak menaruh perhatian lebih terhadap kualitas pelaporan keuangan. Ketiga, pada saat perusahaan memiliki kualitas laba yang rendah maka perusahaan tersebut akan mencoba membangun koneksi politik untuk mendapatkan perlindungan. Menurut Leuz dan Gee (2006) hubungan politik perusahaan juga dapat menjadi substitusi atas pembiayaan dari luar negeri, dan dapat dimanfaatkan untuk mempermudah perusahaan dalam memperoleh pinjaman dalam negeri sehingga tidak perlu mencari

pembiayaan dari investor luar negeri. Bagi perusahaan yang memiliki hubungan politik keuntungan lainnya ialah perusahaan dengan hubungan politik memiliki akses yang lebih terhadap pembiayaan hutang, pajak yang lebih rendah, dan kekuatan pasar yang kuat.

Penelitiannya di Bangladesh sebagai salah satu negara berkembang menemukan bahwa pengusaha atau pemegang saham pengendali atau keluarga memiliki kepentingan ekonominya dan memanfaatkan proses politik untuk kepentingan ekonominya tersebut (Haque, *et al.* 2011). Pemegang saham pengendali memanfaatkan celah pada sistem politik di negara berkembang yang banyak mengaitkan hubungan kronik dan tingkat korupsi yang masih tinggi untuk kepentingan ekonomi dirinya dan perusahaannya. Selain itu dengan hak pengendaliannya terhadap perusahaannya yang sangat kuat dari pemegang saham pengendali dan tidak adanya penegakan aturan ketat atas praktek tata kelola yang baik sehingga berdampak pada implementasi tata kelola perusahaan yang buruk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haque, *et al.* (2011), menjelaskan adanya pengaruh negatif dari kepemilikan yang terkonsentrasi, susunan direksi yang terkoneksi dengan keluarga, serta hubungan politik dari perusahaan terhadap kualitas dari tata kelola perusahaannya.

2.1.5. *Family-aligned Board*

Istilah “*family-aligned board*” pertama kali muncul dalam penelitian Jensen dan Meckling (1976). *Family-aligned board* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dewan direksi yang sebagian besar anggotanya memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan. Dalam konteks perusahaan keluarga, pendiri atau keluarga pemilik perusahaan seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilihan anggota dewan direksi. Anggota dewan direksi yang memiliki kedekatan hubungan dengan keluarga pemilik perusahaan disebut dengan *family-aligned board* (Anderson dan Reeb, 2003). Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa *family-aligned board* dapat meningkatkan kinerja perusahaan keluarga dengan meningkatkan kedekatan antara keluarga pemilik dan manajemen perusahaan, sehingga komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Jensen dan Meckling (1976) juga berpendapat bahwa dewan yang selaras dengan

keluarga (*family-aligned board*), yang terdiri dari anggota yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga pengendali, dapat memainkan peran penting dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham keluarga. Temuan utama penelitian Jensen dan Meckling (1976):

- a. **Penyelarasan Kepentingan:** Dewan yang selaras dengan keluarga dapat membantu menyelaraskan kepentingan manajemen dan keluarga pengendali dengan mengurangi potensi masalah keagenan. Direktur yang berasal dari keluarga lebih cenderung berbagi tujuan dan perspektif jangka panjang keluarga, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik yang bermanfaat bagi pertumbuhan jangka panjang dan nilai perusahaan.
- b. **Pemantauan dan Pengendalian:** Dewan yang selaras dengan keluarga dapat meningkatkan pemantauan dan pengendalian aktivitas manajemen. Direktur keluarga memiliki pengetahuan dan pemahaman orang dalam tentang bisnis keluarga dan lebih mungkin untuk meneliti keputusan manajemen untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan kepentingan keluarga.
- c. **Aliran Informasi:** Dewan yang selaras dengan keluarga dapat memfasilitasi komunikasi dan aliran informasi yang lebih baik antara keluarga pengendali dan manajemen. Direktur keluarga dapat berfungsi sebagai saluran untuk berbagi keprihatinan dan harapan keluarga dengan manajemen, memastikan bahwa keputusan manajemen diinformasikan oleh perspektif keluarga.
- d. **Potensi Kelemahan:** Meskipun dewan yang terdiri dari keluarga dapat memberikan manfaat, mereka juga memiliki potensi kelemahan. Kontrol keluarga yang berlebihan dapat menyebabkan pengikatan manajemen, berkurangnya independensi dewan, dan penindasan terhadap sudut pandang yang berbeda.

2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan ulasan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Haque, Arun, & Kickpatrick (2011)	<i>The Political Economy of Corporate Governance in Developing Economies: The Case of Bangladesh</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Concentrated shareholding as well as family-aligned board and management are negatively associated with the overall quality of governance of a firm.</i> ● <i>Political connection does have a statistically significant negative association with the quality of corporate governance</i>
Wirawan & Diyanty (2014)	Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan <i>Family-aligned board</i> terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap <i>family aligned board</i> dan memiliki hubungan negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan. ● Hubungan politik tidak memiliki pengaruh negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan.
Setiawati, <i>et. al.</i> (2022)	<i>Implementation of corporate governance, family ownership, and family-aligned board: Evidence from Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Family ownership has a positive effect on the composition of the board of commissioners and directors who are affiliated with the family.</i> ● <i>Family ownership (FOWN) significantly hinders the application of corporate governance.</i> ● <i>Family ownership (FOWN) has a favorable impact on the application of corporate governance.</i>

Syarifah (2019)	<i>The Influence of Family Ownership, Family Aligned Board, and Political Connection of Good Corporate Governance in Banking Industry</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● family ownership has an insignificant positive effect ● The family aligned board has an insignificant positive effect ● Political connection has a significant negative effect on the implementation of good corporate governance.
Rizqiani, et al., (2020)	<i>Implementation of Good Hospital Corporate Governance (GCG) in Makassar, Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● This study found that the application of Good Corporate Governance in hospitals involved the concept of transparency and independence.
Hamonangan dan Hermawan (2020)	<i>Analysis of The Implementation of Good Corporate Governance Based on Asean Corporate Governance Scorecard: Case Study PT Jakarta Propertindo (PERSERODA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● The results indicate that PT Jakarta Propertindo (Perseroda) has not fully met all the GCG principles contained in the ASEAN Corporate Governance Scorecard.
Abdallah dan Ismail (2017)	<i>Corporate Governance Practices, Ownership Structure, and Corporate Performance in the GCC Countries</i>	<i>The positive relationship between governance quality and firm performance is maintained and is stronger at low levels of concentrated ownership.</i>
Hasan, et al., (2014)	<i>Monitoring Family Performance: Family Ownership and Corporate Governance Structure in Bangladesh</i>	<i>Family ownership had significant negative influence over board independence and board size, but a significant positive influence on dominant personality. These findings suggest that good governance is not possible under family based culture in Bangladesh</i>
Chou dan Buchdadi (2018)	<i>Executive's compensation, good corporate governance, ownership structure, and firm performance: a study of listed banks in Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● RNC has a negative relationship to the executives' compensation (ES). ● the market value does not have a significant effect on the EC

		<ul style="list-style-type: none"> ● <i>market value has no significant effect to compensation</i> ● <i>Current accounting-based performance have a positive impact on the current compensation</i> ● <i>positive correlation between executives' compensation and firm performance</i> ● <i>ownership concentration (BO) and Independent board (IB) do not have a positive impact on the current EC</i>
Sanjaya, dkk (2022)	<i>Family Ownership and Corporate Performance</i>	<i>Family ownership negatively effect to firm performance</i>
Anderson dan Reeb (2003)	<i>Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Positive relationship between family ownership and firm performance.</i> ● <i>CEOs who are family members (founders or descendants of founders) have a positive relationship with accounting profitability measures.</i> ● <i>The results are inconsistent with the hypothesis that minority shareholders are adversely affected by family ownership, suggesting that family ownership is an effective organizational structure.</i>
Ika, dkk (2020)	<i>Political Connection, Corporate Governance, and Firm Value: Indonesian Evidence</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>There is a positive relationship between political connection and firm value.</i> ● <i>The political connections of the president commissioner and politically connected independent commissioners have a positive effect on firm value.</i> ● <i>Government ownership has a positive effect on firm value.</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate governance practices affect firm value.</i> • <i>The positive relationship between politically connected independent commissioners and firm value is strengthened by better corporate governance implementation.</i>
Putri (2022)	Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan <i>Family-aligned board</i> terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan. • Hubungan politik berpengaruh negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan. • <i>Family aligned board</i> tidak berpengaruh terhadap implementasi tata kelola perusahaan.
Ningrum (2022)	Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan <i>Family Aligned Board</i> Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan. • Kemudian untuk variabel hubungan politik berpengaruh positif terhadap implementasi tata kelola perusahaan. • <i>Family-aligned board</i> tidak memiliki pengaruh dengan implementasi dari tata kelola perusahaan.
Baihaqi dan Sutrisno (2023)	<i>The Effect of Good Corporate Governance Mechanism on Firm Value with Financial Performance as a Moderation Variable</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>managerial ownership has a positive and significant effect on firm value,</i> • <i>audit committee has no significant effect on firm value,</i> • <i>the board of commissioners has no significant effect on firm value,</i> • <i>the board of directors has a positive and significant effect on firm value,</i> • <i>financial performance can moderate the effect of</i>

		<p><i>managerial ownership on firm value,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>financial performance does not moderate the effect of the audit committee on firm value,</i> ● <i>financial performance does not moderate the effect of the board of commissioners on firm value,</i> ● <i>financial performance moderates the effect of the board of directors on firm value.</i>
--	--	---

Sumber: *Review berbagai Jurnal*

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Dalam penelitian Haque *et al.*, (2011) *family ownership* atau kepemilikan keluarga dapat mengarah pada kebijakan internal perusahaan yang lebih condong kepada kepentingan keluarga atau pemegang saham pengendali, daripada kepentingan umum atau pemegang saham minoritas. Hal ini dapat mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan perusahaan, yang merupakan aspek kunci dari *good corporate governance*. Menurut penelitian Haque *et al.*, (2011) *family ownership* atau kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan.

Hasil penelitian Haque *et al.*, (2011) sejalan dengan penelitian Wirawan (2014) dan Syarifah (2019) kepemilikan keluarga terbukti secara empiris memiliki pengaruh negatif terhadap penerapan tata kelola perusahaan. Proporsi kepemilikan keluarga yang tinggi dan kendali atas perusahaan membuat keluarga dapat mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas melalui ekspropriasi. Mekanisme tata kelola perusahaan adalah salah satu cara untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Keluarga akan mempertahankan kontrolnya untuk tetap dapat

memperoleh keuntungan dari pemegang saham minoritas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan ialah:

H1: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan

2.3.2. Pengaruh Hubungan Politik Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Menurut Dicko (2017) hubungan politik adalah hubungan atau koneksi antara perusahaan dengan pihak politik atau pejabat pemerintah yang dapat memberikan akses atau pengaruh pada kebijakan pemerintah atau sumber daya publik. Perusahaan memiliki hubungan politik jika salah satu pemegang saham atau manajemen puncak perusahaan adalah anggota anggota parlemen, menteri atau kepala negara, atau yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai pejabat partai politik (Faccio, 2006: 370). Menurut Micco, *et al.*, (2007) perusahaan dengan hubungan politik memiliki kemungkinan untuk melakukan penyesuaian di dalam pelaporan keuangan untuk kepentingan pemegang saham pengendali sehingga mengorbankan pemegang saham minoritas. Penelitian dari Bebchuk dan Neeman (2005) menunjukkan bahwa transaksi insider di dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi di keluarga menggunakan aset dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, salah satu penggunaan aset perusahaan adalah untuk mempengaruhi politisi dan birokrat untuk tetap menjaga perlindungan investor yang rendah. Dengan perlindungan investor yang tetap rendah maka pemegang saham pengendali akan dapat terus memanfaatkan pemegang saham minoritas melalui ekspropriasi.

Penelitian Wirawan dan Diyanty (2014) serta Ningrum (2022) menyatakan bahwa hubungan politik berpengaruh positif terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Hipotesis ini menyatakan bahwa adanya *political connections* atau hubungan politik belum tentu tidak menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Dengan kata lain, semakin kuat hubungan politik tersebut dapat meningkatkan kualitas implementasi tata kelola perusahaan. Perusahaan dapat saja menerapkan tata kelola perusahaan dan juga memanfaatkan hubungan politiknya untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Jadi adanya hubungan politik ternyata lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang akan berdampak pada kinerja perusahaan bukan untuk menggunakan pengaruh politiknya tersebut dalam rangka

mencegah penerapan tata kelola perusahaan (Wirawan dan Diyanty, 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan ialah:

H2: Hubungan politik berpengaruh positif terhadap implementasi tata kelola perusahaan

2.3.3. Pengaruh *Family-aligned Board* Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan

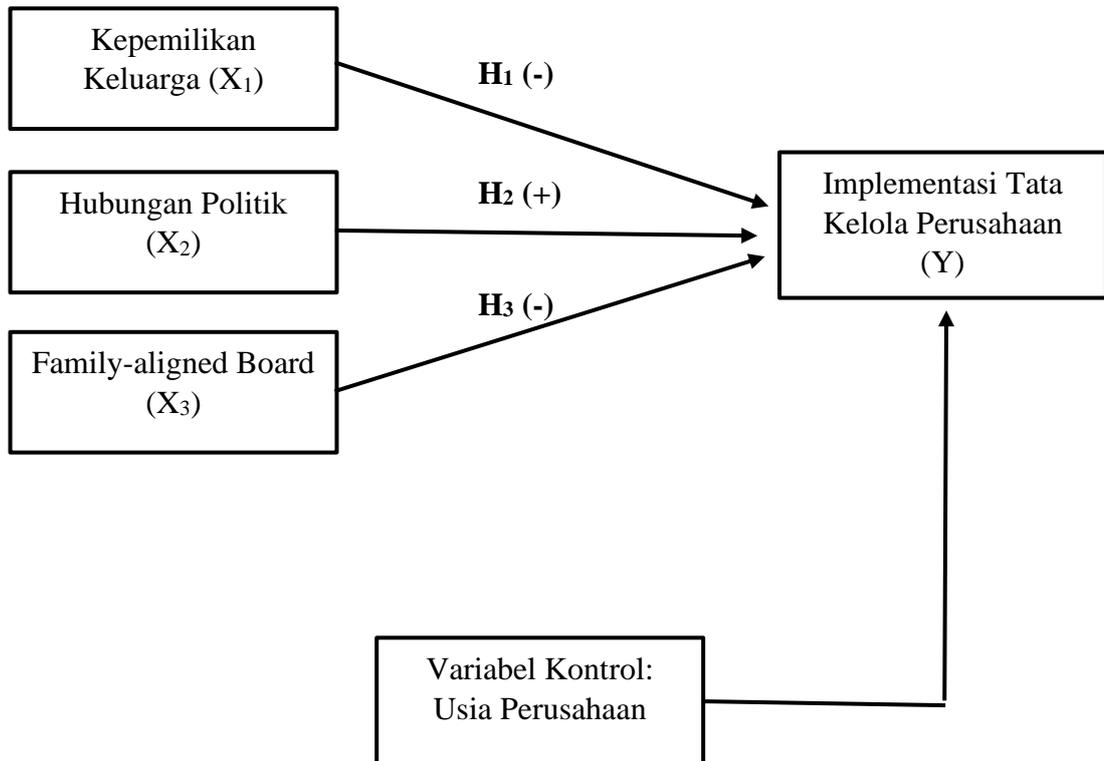
Family aligned board, merupakan sebuah situasi dimana ketika pemilik sebuah perusahaan kemungkinan memiliki kecenderungan untuk menempatkan anggota keluarganya dalam komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Anderson dan Reeb (2005) menjelaskan bahwa terdapat sebuah kecenderungan dari perusahaan dalam upaya menghindari dewan komisaris dari dewan independent dengan tujuan untuk melakukan pengamanan dari kepentingan keluarga sebagai pemegang kontrol. Konsentrasi dari adanya kepemilikan keluarga yang memiliki pengaruh dalam upaya kontrol dalam proses penentuan awal dewan direksi dan dewan komisaris. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap adanya kepentingan keluarga yang menjadi pemegang saham.

Menurut Putri (2022) *family aligned board* tidak berpengaruh terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Hal ini menunjukkan mayoritas perusahaan memilih untuk tidak memiliki afiliasi keluarga dalam struktur direksi dan dewan komisaris agar terhindar dari benturan kepentingan. Sejalan dengan Haque *et al.*, (2011) *family aligned board* memiliki pengaruh negatif terhadap implementasi dari tata kelola perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat keberadaan *family-aligned board*, semakin rendah kualitas tata kelola perusahaan. Keberadaan *family-aligned board* dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, kurangnya independensi dalam pengambilan keputusan, serta pengabaian terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, keberadaan *family-aligned board* dapat menjadi faktor yang mempengaruhi *good corporate governance* secara negatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan ialah:

H3 :Family Aligned Board berpengaruh negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan

2.4. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran yang dibuat dalam model penelitian ini:



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Indonesia yang masuk dalam top 50 *Emiten Mid Cap Indonesian Award* secara periode 2017-2019 yang telah diselenggarakan oleh pihak *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD). Alasan pemilihan sampel penelitian dikarenakan IICD memiliki misi untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia dan meningkatkan kapasitas dan keterampilan para direktur dan komisaris perusahaan di mana misi tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

3.1.2 Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan teknik pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria dan sistematika tertentu yang telah ditetapkan (Ghozali, 2016). Berikut kriteria sampel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Kriteria pemilihan sampel penelitian.

Kriteria	Jumlah
Perusahaan yang masuk dalam <i>Top 50 Emiten Mid Cap Indonesian</i> dari IICD 2017-2019	50
Perusahaan yang tidak masuk top 50 emiten mid cap selama 3 tahun berturut-turut	(29)
Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan dengan nominal rupiah (Rp)	(2)
Total sampel dari tahun 2017-2019	57

Penelitian ini menggunakan 19 perusahaan yang masuk dalam *Top 50 Emiten Mid Cap Indonesian*. Periode penelitian ini yaitu 2017-2019 sehingga di dapat total observasi penelitian sebanyak 57 observasi.

3.2. Definisi Operasional

3.2.1. Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan. Perhitungan yang dipakai peneliti dalam penilaian *Corporate Governance* menggunakan instrumen *ASEAN CG Scorecard*. *Scorecard* menggunakan dua tingkat penilaian yang dirancang untuk lebih menangkap implementasi sebenarnya dari substansi tata kelola perusahaan yang baik. Level 1 terdiri dari deskriptor atau hal-hal yang pada intinya menunjukkan (i) undang-undang, peraturan, regulasi, dan persyaratan dari setiap negara anggota ASEAN; dan (ii) ekspektasi dasar dari prinsip-prinsip G20/OECD. Level 2 terdiri dari (i) item bonus yang mencerminkan praktik baik lainnya yang muncul dan (ii) item penalti yang mencerminkan tindakan dan kejadian yang menunjukkan tata kelola yang buruk. Menurut ACMF (2017) instrumen *ASEAN CG Scorecard* dibagi kedalam dua level dengan total 184 poin.

Level 1: Tahapan pertama terdiri dari 146 poin dimana masing-masing prinsip OECD memiliki poin pertanyaan tersendiri, yaitu prinsip hak pemegang saham terdapat 21 pertanyaan, prinsip perlakuan yang setara terdapat 15 pertanyaan, prinsip peran dari stakeholder terdapat 13 pertanyaan, prinsip pengungkapan dan transparansi terdapat 32 pertanyaan, dan prinsip tanggung jawab dewan direksi dan komisaris terdapat 65 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan diberikan poin 1 apabila menjawab dari pertanyaan.

Level 1 dibagi menjadi 5 bagian sesuai dengan prinsip OECD masing-masing. Setiap bagian memiliki bobot yang berbeda terkait dengan skor total Level 1 100 poin berdasarkan tingkat kepentingan relatif dari area tersebut. Komposisi dan struktur Level 1 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Komposisi dan Struktur Level 1

Level 1	Jumlah Pertanyaan	Bobot (1% dari total skor level 1)	Maksimum Skor
Bagian A: Hak Pemegang Saham	21	10	10 poin
Bagian B: Perlakuan yang Adil terhadap pemegang saham	15	10	10 poin
Bagian C: Peran pemangku kepentingan	13	15	15 poin
Bagian D: Pengungkapan dan Transparansi	32	25	25 poin
Bagian E: Tanggung Jawab Dewan	65	40	40 poin

Sumber: ACMF Working Group D Secretariat 2019

Skor tertimbang dari setiap bagian diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{SKOR} = \frac{\text{Total Points Scored by PLCs}}{\text{Total Possible point from all questions}} \times \text{weightage for the part}$$

(*ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments, 2019*)

Contoh penghitungan menggunakan rumus skor di atas adalah setelah melakukan scoring tersebut dilakukan penjumlahan setiap prinsip. Pada bagian A: Hak Pemegang Saham memiliki 21 jumlah pertanyaan maka perhitungannya adalah total poin dibagi dengan jumlah pertanyaan dan hasilnya dikalikan bobot 10 persen. Pada bagian B, C, D, dan E dilakukan penghitungan yang sama seperti contoh dengan mengganti jumlah pertanyaan dan bobot persen seperti pada Tabel 2.

Level 2: Tahapan kedua bersifat tambahan mengenai bonus dan penalti. Bonus memiliki poin pertanyaan sebanyak 13 poin untuk mengapresiasi atas implementasi tata kelola perusahaan yang dijalankan melebihi standar minimum yang bersifat menambah total skor level 1. Sebanyak 25 poin pertanyaan tentang penalti untuk perusahaan yang memiliki implementasi tata kelola perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip dan bersifat mengurangi dari total skor. Dengan penghitungan bonus adalah total poin bonus yang didapat dibagi dengan jumlah pertanyaan lalu dikalikan 30. Pada penghitungan penalti adalah total level 1 ditambah bonus lalu dikurangi poin penalti.

Level 2 terdiri dari item bonus dan penalti yang dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan ASEAN Scorecard dalam menilai sejauh mana perusahaan menerapkan

semangat tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan dari item bonus adalah untuk mengenali perusahaan yang melampaui item di Level 1 dengan mengadopsi praktik tata kelola perusahaan yang baik lainnya yang muncul. Item penalti dirancang untuk menurunkan peringkat perusahaan dengan praktik tata kelola perusahaan yang buruk yang tidak tercermin dalam skor mereka untuk Level 1, seperti sanksi oleh regulator karena melanggar aturan pencatatan. Level 2 berisi 13 bonus dan 26 item penalti, masing-masing dengan jumlah poin yang berbeda. Poin bonus maksimum yang dapat dicapai adalah 30 sedangkan penalti maksimum yang dapat dikurangkan adalah 67 (Tabel 3.3).

Tabel 3.3
Komposisi dan Struktur Level 2

Tingkat 2	Jumlah Pertanyaan	Skor Maksimum (Poin)
Bonus	13	30
Pinalti	25	(67)

() = negatif

Sumber: ACMF Working Group D Sekretariat 2019.

Skor Level 2 diperoleh dengan menjumlahkan skor bonus dan penalti.

Skor total diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Total Skor} = \text{Skor Level 1} + \text{Skor Level 2}$$

(ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments, 2019)

Skor maksimum yang dapat dicapai adalah 130 poin (100 poin dari level 1 dan 30 poin dari level 2).

3.2.2. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah persentase saham yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Keluarga adalah seluruh individu dan perusahaan yang terdaftar kepemilikannya. Selain itu, kepemilikan keluarga dapat diartikan sebagai kepemilikan tidak langsung dari keluarga tetapi kepemilikan mereka melalui kelompok atau perusahaan atau badan hukum yang dimiliki oleh mereka.

Menurut Harijono (2013) penelusuran kepemilikan keluarga dilakukan dengan melihat nama direksi dan dewan komisaris, jika nama direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan memiliki saham dalam kepemilikan perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dimasukkan sebagai kepemilikan

keluarga. Kepemilikan keluarga dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan yang dimiliki keluarga dengan jumlah saham yang beredar.

$$KK = \frac{\text{Jumlah saham keluarga}}{\text{Jumlah total stock}} \times 100\%$$

3.2.3. Hubungan Politik

Suatu perusahaan didefinisikan memiliki keterhubungan politik jika “setidaknya satu dari pemegang saham besarnya (siapa pun yang mengendalikan setidaknya 10% dari saham dengan hak suara) atau satu dari pejabat tingginya (CEO, presiden, wakil presiden, ketua, atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri atau kepala negara, atau memiliki hubungan dekat dengan politisi atau partai papan atas” (Faccio, 2006). Keeratan dapat dilihat dari kaitannya dengan secara langsung mempengaruhi keputusan perusahaan semakin besar nilai yang didapatkan maka semakin mempengaruhi, sedangkan semakin kecil nilai maka keputusan perusahaan akan semakin kurang mempengaruhi.

Pengukuran ini merujuk pada penelitian Anggraeni dan Djakman (2017) dan Jizi *et al.*, (2014). Pengungkapan dengan kategorikal 0-3 tersebut juga diharapkan mampu menjelaskan bagaimana hubungan politik memengaruhi implementasi tata kelola perusahaan. Selanjutnya, untuk mendapatkan indeks hubungan politik perusahaan, total skor hubungan politik dibandingkan dengan total skor maksimum di mana pada penelitian ini skor maksimumnya ialah 3. Rumusnya ialah sebagai berikut:

$$HP = \frac{SHBi}{SMAX}$$

Keterangan:

HP = Hubungan Politik

SHB_i = Skor hubungan politik i

SMAX = Skor maksimum hubungan politik

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh penelitian Puspitasari (2016). Dengan menggunakan kategorikal 0-3 pada setiap indikator informasi yang telah diungkapkan dalam tabel 3.4:

Tabel 3.4

Indikator Informasi Perusahaan yang Memiliki Hubungan Politik

Nilai perusahaan memiliki hubungan politik	Kriteria
Bernilai 0	Jika perusahaan tidak memiliki hubungan politik atau dewan komisaris mantan pejabat pemerintah
Bernilai 1	Jika Dewan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan politisi atau anggota partai politik ataupun jika kerabat dekat (bapak, ibu, suami, istri, anak, serta saudara kandung) dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan politisi atau anggota partai politik.
Bernilai 2	Jika Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota DPR dan tidak termasuk jika jabatan anggota DPR dipegang oleh kerabat dekat (bapak, ibu, suami, istri, anak, serta saudara kandung). Hal ini dikarenakan terkait teknis dalam pencarian data sampel, yaitu dengan banyaknya jumlah anggota DPR di Indonesia maka terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi dan mencari daftar kerabat atau keluarga dari anggota DPR tersebut.
Bernilai 3	Jika Dewan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan anggota pemerintahan, yaitu menteri, wakil menteri ataupun jika terdapat kerabat dekat (bapak, ibu, suami, istri, anak, serta saudara kandung) dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menjabat sebagai menteri atau wakil menteri.

3.2.4. Family-aligned Board

Family aligned board adalah persentase dewan direksi dan/atau komisaris yang memiliki hubungan dengan keluarga pemegang saham pengendali. *Family-aligned executive* adalah CEO perusahaan merupakan bagian atau memiliki hubungan dengan keluarga pemegang saham (Wirawan, 2014). Pengukuran ini juga merujuk pada penelitian Anggraeni dan Djakman (2017) dan Jizi *et al.*, (2014).

Pengungkapan dengan kategorikal 0-2 tersebut juga diharapkan mampu menjelaskan bagaimana *family-aligned board* memengaruhi implementasi tata kelola perusahaan. Selanjutnya, untuk mendapatkan indeks *family-aligned board*, total skor *family-aligned board* dibandingkan dengan total skor maksimum di mana pada penelitian ini skor maksimumnya ialah 2. Rumusnya ialah sebagai berikut:

$$\mathbf{FAB} = \frac{\mathbf{SFAB}_i}{\mathbf{SMAX}}$$

Keterangan:

FAB = *Family-aligned Board*

SHB_i = Skor *family-aligned board* i

SMAX = Skor maksimum *family-aligned board*

Hubungan dewan komisaris dan dewan direksi dengan keluarga pemegang saham pada penelitian ini diuraikan dengan menggunakan UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang dimaksud adalah:

- 1) “hubungan keluarga karena perkawinan” adalah hubungan seseorang dengan:
 - a) suami atau istri;
 - b) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal);
 - c) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal);
 - d) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal); dan
 - e) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal)
- 2) “hubungan keluarga karena keturunan” adalah hubungan seseorang dengan:
 - a) orang tua dan anak (derajat I vertikal);
 - b) kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); dan
 - c) saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

Tabel 3.5 Indikator informasi dewan direksi dan/atau dewan komisaris yang memiliki hubungan dengan keluarga pemegang saham

Nilai dewan direksi dan/atau dewan komisaris memiliki hubungan dengan CEO (keluarga pemegang saham)	Tipe dewan direksi dan/atau dewan komisaris yang memiliki hubungan dengan CEO (keluarga pemegang saham)
Bernilai 0	Jika dewan direksi dan/atau dewan komisaris tidak memiliki hubungan dengan CEO (keluarga pemegang saham)
Bernilai 1	Jika dewan direksi dan/atau dewan komisaris memiliki hubungan dengan derajat II vertikal atau derajat II horizontal
Bernilai 2	Jika dewan direksi dan/atau dewan komisaris memiliki hubungan dengan derajat I vertikal

3.2.5. Variabel Kontrol

3.2.5.1. Usia Perusahaan

Dalam penelitian ini, usia perusahaan merujuk pada usia perusahaan dengan lama perusahaan tersebut telah *listing* (Sukamulja, 2004). Usia perusahaan dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Usia perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki lebih banyak pengalaman dan sumber daya yang lebih besar, sementara perusahaan yang lebih muda cenderung lebih inovatif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang lebih cepat. Rumusnya ialah sebagai berikut:

$$UP = \text{Tahun Observasi} - \text{Tahun Listing}$$

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis statistik. Adapun jenis uji yang digunakan dalam teknik analisis statistik ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis.

3.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji statistik umum yaitu statistik deskriptif. Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian maksimum, dan minimum. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

3.3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui beberapa penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian. Asumsi klasik yang digunakan penelitian ini, yaitu:

3.3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Hasil uji normalitas dikatakan normal apabila nilainya lebih dari 5% atau lebih dari 0,05 pada hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorov smirnov*. Kriteria uji Kolmogorov smirnov (Ghozali, 2016) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika *p-value (Asymp.sig.)* > 0,05 maka data berdistribusi normal
- 2) Jika *p-value (Asymp.sig.)* < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

3.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika model yang baik tidak seharusnya terjadi korelasi antar variabel (Ghozali, 2016). Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan menganalisis matriks korelasi atau dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Adapun kriteria uji multikolinearitas adalah:

- a. Jika nilai *tolerance* > 10 dan nilai VIF < 10 maka, tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* < 10 dan nilai VIF > 10 maka, ada multikolinearitas dalam model regresi.

3.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser* dengan melihat pada tingkat signifikansi hasil regresi nilai *absolute residual*. Model regresi dikatakan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas jika memenuhi kriteria (Ghozali, 2016) sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi (probabilitas) dari t hitung $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika signifikansi (probabilitas) dari t hitung $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas

3.3.3. Transformasi Data

Transformasi data dilakukan dengan tujuan untuk mengubah skala pengukuran data asli sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis. Menurut Osborne (2002), transformasi data adalah metode yang dapat digunakan dalam penelitian. Jika dilakukan dengan baik, semua data akan tetap dalam urutan yang sama seperti sebelum transformasi.

Jenis transformasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah transformasi *Square Root* (akar kuadrat) untuk membuat ragam menjadi homogen. Pada uji ini, dilakukan transformasi data pada variabel Implementasi Tata Kelola Perusahaan (variabel dependen). Hal ini dilakukan karena nilai yang sangat besar gapnya dengan variabel lain. Dasar melakukan transformasi data dengan menggunakan rumus *SQRT* (*square root*). Alasan penggunaan rumus *SQRT* adalah dikarenakan bentuk histogram *Moderate Positive Skewness*.

3.3.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Model regresi berganda adalah suatu teknik analisis regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval (Ghozali, 2016). Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$CG = \alpha + \beta_1KK + \beta_2HP + \beta_3FAB + \beta_4UP + \varepsilon$$

Keterangan:

CG	= Tata Kelola
β_1KK	= Kepemilikan Keluarga
β_2HP	= Hubungan Politik
β_3FAB	= <i>Family-aligned Board</i>
β_4UP	= Usia Perusahaan

3.3.5. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji ini juga digunakan untuk mengetahui model regresi *fit of goodness* atau tidak. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika tingkat signifikansi $F_{hitung} < \text{signifikansi } F_{tabel}$ berarti model yang digunakan *fit of goodness*.
- Jika tingkat signifikansi $F_{hitung} > \text{signifikansi } F_{tabel}$ berarti model yang digunakan tidak *fit of goodness*.

3.3.6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dengan uji t untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual/parsial dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan *level of significance* 0.05 ($\alpha = 5\%$). Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai sig. $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai sig. $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.3.7. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan *adjusted* R^2 berkisar antara nol dan satu. Jika nilai *adjusted* R^2 makin mendekati satu maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independennya (Ghozali, 2016).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan keluarga, hubungan politik dan *Family-aligned Board* terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Adapun keterbaruan dari penelitian ini adalah peneliti mengajukan kebaruan dalam pengukuran dengan kategorikal 0-3 pada variabel hubungan politik dan kategorikal 0-2 pada variabel *Family-aligned Board* yang membuat penelitian ini lebih detail dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham oleh dewan direksi dan dewan komisaris tidak mengindikasikan bahwa dapat menaikkan kualitas implementasi tata kelola sebuah perusahaan. Proporsi kepemilikan keluarga yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk ekspropriasi. Mekanisme tata kelola perusahaan penting untuk melindungi pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi perlu menjalankan tata kelola perusahaan dengan lebih baik.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kuat hubungan politik pada sebuah perusahaan maka semakin tinggi kualitas implementasi tata kelola perusahaannya, dengan dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki

hubungan politik dapat meningkatkan kualitas implementasi tata kelola perusahaan. Perusahaan dengan hubungan politik, termasuk anggota partai politik di dewan direksi atau DPR, tidak selalu buruk dalam tata kelola.

3. Hasil penelitian pada variabel *Family-aligned Board* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kuat keberadaan *Family-aligned Board*, semakin rendah kualitas tata kelola perusahaan. Semakin banyak anggota dewan terafiliasi dengan keluarga, semakin rendah kualitas tata kelola perusahaan. Keputusan yang diambil cenderung menguntungkan keluarga daripada pemegang saham, mengancam kualitas tata kelola perusahaan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan pengukuran *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang bersifat internasional. *ASEAN CG Scorecard* ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan konteks lokal atau tantangan spesifik yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia.
2. Variabel dependen (Implementasi Tata Kelola Perusahaan) yang dihitung dengan cara mengukur *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dengan skor yang dicari secara manual dalam *annual report* oleh peneliti, dapat tidak akurat karena data yang tidak lengkap dalam *annual report*. Sehingga mempengaruhi hasil analisis dan kesimpulan yang diambil.
3. Variabel hubungan politik dan *family-aligned board* juga tidak sepenuhnya objektif, dikarenakan terbatasnya informasi yang didapat dalam *annual report* ataupun internet. Selain itu juga terdapat keterbatasan sumber informasi yang dapat dipercaya yang disebabkan keterbatasan waktu penelitian di dalam proses penilaian hubungan politik perusahaan.
4. Pada penelitian ini indikator pengukuran *family-aligned board* menggunakan pengukuran kategorikal yang didapat pada *annual report* perusahaan di mana pengungkapannya *mandatory* atau wajib diungkapkan dalam *annual report*. Alasan mengapa tidak terdukung variabel tersebut

adalah dikarenakan pengungkapan afiliasi keluarga kurang spesifik pada *annual report* maka peneliti tidak dapat menspesifikasikan hasil tersebut dalam pengukuran.

5. Penelitian ini hanya menggunakan sampel tahun 2017 sampai dengan 2019 dikarenakan penilaian dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard 2019* yang telah selesai sampai *Report and Assasement* nya. Pada penelitian ini tidak menggunakan pengukuran *ACGS 2023*, dikarenakan belum terdapat hasil sampai *Report and Assasementnya* di mana *Report and Assasement* tersebut penting untuk mengetahui bagaimana rumus yang digunakan dalam menghitung hasil penilaian tersebut.
6. Jumlah sampel terbatas karena kriteria sampling yang membatasi perusahaan harus masuk ke dalam *top 50 emiten mid cap* selama 3 tahun berturut-turut.
7. Penelitian ini hanya menggunakan *Agency theory* sebagai pendukung hasil penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang peneliti temui, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur penerapan tata kelola perusahaan dengan menggunakan alternatif indeks tata kelola lain bila memungkinkan dan diharapkan jumlah sampel pada penelitian ini dapat diperluas.
2. Penelitian selanjutnya jika menggunakan penilaian *self assessment* diharapkan dapat lebih teliti dan cermat dalam setiap indikator pertanyaan dalam prinsip tersebut. Sehingga, hasil penelitian mencerminkan fenomena yang sesungguhnya.
3. Selain menggunakan laporan tahunan dan informasi internet, pertimbangkan untuk mengumpulkan data dari sumber primer seperti wawancara dengan anggota dewan, pejabat perusahaan, atau ahli yang dapat memberikan wawasan tambahan.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan sampel yang lebih besar atau beragam untuk meningkatkan generalisasi hasil.

5. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran dengan tahun yang terbaru pada ACGS 2023 yang dikeluarkan oleh *Asian Development Bank* atau dapat menggunakan alternatif pengukuran yang lain.
6. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan data panel pada pengambilan sampel penelitian agar meningkatkan jumlah observasi dan memperoleh variasi antar unit yang berbeda
7. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan *grand theory* seperti *stakeholder theory* guna memperluas sejauh mana GCG dapat menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A. A.-N., & Ismail, A. K. (2017). Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 46, 98–115. doi:10.1016/j.intfin.2016.08.004
- Abelson, M. A., & Baysinger, B. D. (1984). Optimal and Dysfunctional Turnover: Toward an Organizational Level Model. *The Academy of Management Review*, 9(2), 331. doi:10.2307/258446
- Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. *The Journal of Finance*, 58(3), 1301–1328. doi:10.1111/1540-6261.00567
- Annisa, S. Dkk. (2021). Studi Literatur: Implementasi Good Corporate Governance pada Bisnis Keluarga. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>
- Anggraeni, Dian Yuni and Djakman, Chaerul D. (2017). "Slack Resources, Feminisme Dewan, dan Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia: Vol. 14: Iss. 1, Article 6*. DOI: 10.21002/jaki.2017.06
- Arifin. (2005). Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan).
- Asian Development Bank (ADB). (2021). ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments 2019. <https://dx.doi.org/10.22617/TCS210345>
- Azwari, P. C. (2016). Masalah Keagenan Pada Struktur Kepemilikan Perusahaan Keluarga Di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (2)*. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i2.4021>
- Baihaqi, M., F. (2023). The Effect of Good Corporate Governance Mechanism on Firm Value with Financial Performance as a Moderation variable. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*. Vol. 06 Issue 07. <http://dx.doi.org/10.47191/ijmra/v6-i7-39>
- Bebchuk, L., & Neeman, Z. (2005). A political economy model of investor protection. <https://its.law.nyu.edu/faculty/coursepages/data/Bebchuk-Neeman.Jul05.pdf>
- Braam, G., Nandy, M., Weitzel, U., & Lodh, S. (2015). Accrual-based and real earnings management and political connections. *The International Journal of Accounting*, 50(2), 111–141. doi:10.1016/j.intacc.2013.10.009

- Brogaard, J., Denes, M., & Duchin, R. (2016). Political Influence and Government Investment: Evidence from Contract-Level Data. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2604>
- Cheng, Q. (2014). Family firm research – A review. *China Journal of Accounting Research*, 7(3), 149–163. doi:10.1016/j.cjar.2014.03.002
10.1016/j.cjar.
- Chou, T. & Buchdadi, A., D. (2018). Executive's Compensation, Good Corporate Governance, Ownership Structure, and Firm Performance: a study of listed banks in Indonesia. *Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR)*, Vol. 12 Issue 3. <http://dx.doi.org/10.24052/JBRMR/V12IS03/ART-07>
- Dicko, S. (2017). Political connections, ownership structure and quality of governance. *International Journal of Managerial Finance*, 13(4), 358–377. doi:10.1108/ijmf-01-2017-0010
- Ding, S., Jia, C., Wu, Z., & Zhang, X. (2014). Executive political connections and firm performance: Comparative evidence from privately-controlled and state-owned enterprises. *International Review of Financial Analysis*, 36, 153–167. doi:10.1016/j.irfa.2013.12.006
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. doi:10.1257/0002828067761577
- Faccio, M. (2010). Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. *Financial Management*, 39(3), 905–928. doi:10.1111/j.1755-053x.2010.01099.x
- Faccio, M., Lang, L. H. P., & Young, L. (2001). Dividends and Expropriation. *American Economic Review*, 91(1), 54–78. doi:10.1257/aer.91.1.54
- Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns." *The Journal of Finance*, 67(2): 427-465.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Vol. Edisi 8.
- Hamdani, M. (2016). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory. SEMNAS FEKON 2016. <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/6589>
- Hamonangan, F., R. & Hermawan, A., A. (2020). Analysis of The Implementation of Good Corporate Governance Based on ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD: Case Study PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA). Volume 1, Issue 4. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v1i4.258>
- Haque, F., Arun, T., & Kirkpatrick, C. (2011). The political economy of corporate governance in developing economies: The case of Bangladesh. *Research in International Business and Finance*, 25(2), 169–182. doi:10.1016/j.ribaf.2011.01.001

- Harianto, S. (2022). Political Connections impact on Corporate Governance Quality. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.21632/saki.5.2.190-218>
- Hasan, M. S., Rahman, R. A., & Hossain, S. Z. (2014). Monitoring Family Performance: Family Ownership and Corporate Governance Structure in Bangladesh. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 103–109. doi:10.1016/j.sbspro.2014.06.016
- Ika, S., R. Dkk. (2020). Political Connection, Corporate Governance, and Firm Value: Indonesian Evidence. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 173. <http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.210416.006>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. doi:10.1016/0304-405x(76)90026-x
- Jizi, M. I., Salama, A., Dixon, R., & Stratling, R. (2013). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the US Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 125(4), 601–615. doi:10.1007/s10551-013-1929-2
- Khwaja, A. I., & Mian, A. (2005). Do Lenders Favor Politically Connected Firms? Rent Provision in an Emerging Financial Market. *The Quarterly Journal of Economics*, 120(April), 371–411. <http://www.jstor.org/stable/25098774?origin=JSTOR-pdf>
- Leuz, C., & Oberholzergee, F. (2006). Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia☆. *Journal of Financial Economics*, 81(2), 411–439. doi:10.1016/j.jfineco.2005.06.006
- Lozano, M. B., Martínez, B., & Pindado, J. (2016). Corporate governance, ownership and firm value: Drivers of ownership as a good corporate governance mechanism. *International Business Review*, 25(6), 1333–1343. doi:10.1016/j.ibusrev.2016.04.005
- Lukviarman & Niki. (2016). *Corporate Governance Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. ISBN 978-602-1680-39-1
- Micco, A., Panizza, U., & Yañez, M. (2007). Bank ownership and performance. Does politics matter? *Journal of Banking & Finance*, 31(1), 219–241. doi:10.1016/j.jbankfin.2006.02.00
- Ningrum, L. C., & Setiawati. E. (2022). Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan *Family Aligned Board* Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 6, No. 1. <https://doi.org/10.30651/imp.v2i1.11710>
- Nizami, N., & Sakir, A. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Indeks LQ 45 yang Tercatat Di Bursa

- Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.24815/jimen.v5i2.15155>
- Osborne, J. (2002). Notes on the use of data transformations. *Practical assessment, research, and evaluation*, 8(1). <https://doi.org/10.7275/4vng-5608>
- Putri, A. R., & Setiawati. E. (2022). Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan *Family Aligned Board* Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 2 No. 1. <https://doi.org/10.30651/imp.v2i1.11710>
- Puspitasari, A. (2016). Pengaruh Hubungan Politik, Ukuran KAP, Dan Audit Tenure Terhadap Manajemen Laba Riil. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 18, No. 1. doi: 10.9744/jak.18.1.27-43
- PricewaterhouseCoopers. (2014). Survey Bisnis Keluarga 2014 Indonesia. <https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/indonesia-report-family-business-survey-2014.pdf>
- Sanjaya, I., P., S. Dkk. (2022). Family Ownership and Corporate Performance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02)
- Sarbah, A., & Xiao, W. (2015). Good Corporate Governance Structures: A must for Family Businesses. *Open journal of Businesses and Management*, 3, 40-57. <http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2015.31005>
- Setiawati, E., Putri, E., & Nisa, N. (2022). Implementation Of Corporate Governance, Family Aligned Board: Evidence From Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, Volume 20, Issue 4. doi:10.21511/ppm.20(4).2022.02
- Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3. doi:10.2307/3003160
- Sukamulja, S. (2004). Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta). *BENEFIT*, Vol. 8 No. 1. <https://journals.ums.ac.id/benefit/issue/view/209>
- Syarifah, N. D. (2019). *The Influence Of Family Ownership, Family Aligned Board, and Political Connection Toward the Implementation of Good Corporate Governance in Banking Industry*. <http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/3737>
- Triyuwono, E. (2018). Proses Kontrak, Teori Agensi, dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance). <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3250329>
- Utamaningsi, L. (2020). Perusahaan Keluarga, Koneksi Politik & Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), Februari 2020, pp.68-73. DOI:10.33087/jiubj.v20i1.840
- Watts, R., & Zimmerman, J. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Years Perspective. *The Accounting Review*, 65, 131-156.

Wirawan, B., & Diyanty, V. (2014). Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan *Family Aligned Board* Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan. *JAAI* Vol. 18 No. 2. <https://doi.org/10.20885/jaa.vol18.iss2.art5>